

**ANALISIS PENGARUH STRUKTUR
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN PENGUNGKAPAN
KONVERGENSI IFRS PADA LAPORAN LABA
RUGI KOMPREHENSIF
(Studi Empiris pada Perusahaan Jasa yang Terdaftar Di Bursa
Efek Indonesia Tahun 2010-2012)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

ANGGITA PITASARI
NIM 12030110141039

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2014**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Anggita Pitasari
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110141039
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PENGUNGKAPAN KONVERGENSI IFRS PADA LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF (Studi Empiris pada Perusahaan Jasa yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012)**
Dosen Pembimbing : Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 21 Maret 2014

Dosen Pembimbing,

(Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt.)

NIP. 19790924 200812 2003

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Anggita Pitasari
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110141039
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH STRUKTUR
CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN
PENGUNGKAPAN KONVERGENSI
IFRS PADA LAPORAN LABA RUGI
KOMPREHENSIF
(Studi Empiris pada Perusahaan Jasa
yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
Tahun 2010-2012)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 28 Maret 2014

Tim Penguji

1. Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt. (.....)
2. Anis Chariri, S.E., M.Com., Ph.D., Akt (.....)
3. Andri Prastiwi, S.E., M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Anggita Pitasari, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: *ANALISIS PENGARUH STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PENGUNGKAPAN KONVERGENSI IFRS PADA LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF*, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 21 Maret 2014

Yang membuat pernyataan,

Anggita Pitasari

NIM : 12030110141039

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana struktur *corporate governance* perusahaan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Al Akra et al. (2010) dan Prawinandi et al. (2012).

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan pengujian hipotesis. Pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS *release* 16. Secara keseluruhan 40 sampel perusahaan jasa digunakan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS dalam laporan laba rugi komprehensif adalah 50,61%. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa struktur *corporate governance* yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif yaitu jumlah anggota komite audit dan jumlah rapat komite audit. Sementara itu, variabel jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, *leverage*, likuiditas, dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif.

Kata kunci : Struktur *corporate governance*, Tingkat kepatuhan pengungkapan, Konvergensi IFRS, Laporan Laba Rugi Komprehensif.

ABSTRACT

This study aims to analyse how corporate governance structures affect the level of disclosure compliance convergence of IFRS in statements of comprehensive income. This research is the development of a study conducted by Al Akra et al . (2010) and Prawinandi et al . (2012) .

Data analysis method used is descriptive analysis method and hypothesis testing . Tests performed using SPSS release 16. Overall sample of 40 service companies used in this study.

The results of this study showed that the average level of disclosure compliance convergence of IFRS in statements of comprehensive income is 50.61 %. The results of multiple regression analysis showed that the structure of corporate governance which affect the level of disclosure compliance convergence of IFRS in statements of comprehensive income is the number of audit committee members and the number of audit committee meetings. Meanwhile, a variable number of commissioners, the proportion of independent commissioners, the number of commissioners meeting, leverage, liquidity, and profitability are not significantly influence with the level of disclosure compliance convergence of IFRS in statements of comprehensive income.

Keywords : corporate governance structure , level of disclosure compliance, Convergence of IFRS , Statements of Comprehensive Income

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, kemudahan dan kekuatan, serta Rasulullah SAW yang telah menjadi inspirasi bagi penulis sehingga skripsi yang berjudul “ Analisis Pengaruh Struktur *Corporate Governance* terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Konvergensi IFRS pada Laporan Laba Rugi Komprehensif” dapat selesai dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa selama melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, bantuan serta doa yang tulus sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua tercinta yaitu Nunuk Kuswardani dan Muharno yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan dan kasih sayang kepada penulis.
2. Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, Ph.D., M.Si., Akt., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

3. Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dengan baik, memberikan saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Muchammad Syafruddin, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang telah memberikan banyak pelajaran penting bagi penulis.
5. Dr. Agus Purwanto, S.E., M.Si., Akt., selaku dosen wali yang telah membantu penulis selama menjalani proses perkuliahan.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan telah membantu selama masa perkuliahan.
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah membantu selama proses perkuliahan
8. Kakakku, Septian Ananggadipa yang menjadi inspirasi dan selalu membantu, mendukung serta mendoakan penulis dalam aktivitas belajar dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Hanitio Adhi Pratama, yang selalu sabar, mendoakan dan mendukung penulis dalam menjalani masa perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.
10. R. Meike Erika, Devi Novita, Panggih Rizki, Laras Esti, Robby Heryanto serta seluruh teman-teman Akuntansi 2010 yang selalu mendukung dan mendoakan serta telah memberikan warna dalam menjalani perkuliahan.
11. Anggrahini dan Gratia, teman seperjuangan dalam proses bimbingan skripsi yang selalu mendoakan, mendukung dan selalu memberi semangat.

12. Mas Luky, Mbak Rima, Mas Harish, Mas Gagat, dan Mas Rahman, kakak-kakak senior yang banyak membantu selama menjalani masa perkuliahan.
13. Teman-teman KKN Tim II Desa Rengas Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
14. Andhika Rahadian serta seluruh anggota pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi yang telah memberikan banyak pengalaman dan pelajaran berharga di luar perkuliahan.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan akan mendapat imbalan dari Allah SWT. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 Maret 2014

Penulis

Anggita Pitasari

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.”

QS. Al Baqarah : 153

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

QS. Al Insyirah : 6 – 8

Optimisme tidak akan membuatmu lepas dari suatu masalah. Dengan tetap optimis maka akan membuat kita yakin untuk melewati semua tantangan.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- *Ibu dan Bapak yang tercinta*
- *Kakakku tersayang Septian Anangadipa*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS.....	11
2.1.2 Struktur Corporate Governance.....	13
2.1.2.1 Jumlah Anggota Dewan Komisaris.....	17
2.1.2.2 Proporsi Komisaris Independen	18
2.1.2.3 Jumlah Anggota Komite Audit	19
2.1.2.4 Jumlah Rapat Dewan Komisaris	20
2.1.2.5 Jumlah Rapat Komite Audit	21

2.1.3 Teori Agensi	22
2.2 Penelitian Terdahulu.....	23
2.2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	28
2.3 Kerangka Pemikiran	30
2.4 Perumusan Hipotesis	31
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian.....	39
3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	39
3.2.1 Variabel Dependen.....	39
3.2.2 Variabel Independen	40
3.2.3 Variabel Kontrol	43
3.3 Populasi dan Sampel.....	44
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	45
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	45
3.6 Metode Analisis.....	45
3.6.1 Statistik Deskriptif	46
3.6.2 Pengujian Hipotesis	46
3.6.2.1 Analisis Regresi	47
3.6.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	52
4.2 Analisis Data.....	54
4.2.1 Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS.....	54
4.2.2 Statistik Deskriptif	55
4.2.3 Uji Asumsi Klasik.....	62
4.2.3.1 Uji Normalitas.....	62
4.2.3.2 Uji Multikolinearitas	63
4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas	64
4.2.3.4 Uji Autokorelasi	66
4.2.4 Analisis Regresi Berganda	67

4.2.5 Uji Hipotesis	70
4.3 Interpretasi Hasil	74
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan	82
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	83
5.3 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	88

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 PSAK yang telah konvergen dengan IFRS terkait pada laporan laba rugi komprehensif	26
Tabel 2.2 <i>Research Gap</i>	27
Tabel 2.3 Ringkasan Penelitian Terdahulu	28
Tabel 4.1 Sampel Penelitian.....	53
Tabel 4.2 Item Pengungkapan Konvergensi IFRS	54
Tabel 4.3 Deskripsi Variabel Penelitian	56
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas.....	63
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas	64
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas	66
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi.....	67
Tabel 4.8 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik f)	68
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	68
Tabel 4.10 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)....	69
Tabel 4.11 Hasil Uji Hipotesis	74

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur <i>Two Tiers System</i> di Indonesia	18
Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran	31
Gambar 4.1 Perubahan Tingkat Pengungkapan Konvergensi IFRS.....	57
Gambar 4.2 Identifikasi Outlier.....	62
Gambar 4.3 <i>Scatterplot</i>	62

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Deloitte IFRS Presentation and Disclosure Checklist.....	88
Lampiran B Daftar Perusahaan Sampel.....	100
Lampiran C Tabulasi Variabel Independen dan Dependen	101
Lampiran D Output SPSS	105

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang Masalah

Era globalisasi saat ini menuntut adanya suatu sistem akuntansi internasional yang dapat diberlakukan secara internasional di setiap negara, atau diperlukan adanya harmonisasi terhadap standar akuntansi internasional, dengan tujuan agar dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat diperbandingkan, mempermudah dalam melakukan analisis kompetitif dan hubungan baik dengan pelanggan, *supplier*, investor, dan kreditor (Gamayuni, 2009). Untuk melindungi kepentingan *stakeholders* ini diperlukan adanya peraturan tentang pengungkapan wajib dalam laporan keuangan karena tanpa peraturan ini dapat membuat perusahaan menyembunyikan informasi penting yang seharusnya diungkapkan (Prawinandi et al., 2012).

Di Indonesia standar akuntansi keuangan berbasis IFRS mulai diterapkan sejak tahun 2012. Sebelum tahun 2012 penerapan dini standar akuntansi keuangan yang berbasis IFRS dianjurkan bagi perusahaan yang mau menerapkan. Oleh karena itu, sebelum tahun 2012 bagi perusahaan yang telah mampu menerapkan IFRS diperbolehkan untuk menggunakan standar akuntansi internasional tersebut.

Dalam standar akuntansi internasional juga telah mengatur pengungkapan wajib dalam laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan berbasis IFRS

diterapkan untuk entitas dengan akuntabilitas publik. Sebagai contoh yaitu perusahaan emiten, perusahaan publik, perbankan, asuransi, dan perusahaan BUMN. Menurut Gamayuni (2009), semua perusahaan *go public* dan multinasional di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan standar akuntansi yang konvergen dengan IFRS untuk penyusunan laporan keuangan pada atau setelah 1 Januari 2012.

Perusahaan yang menerapkan standar akuntansi keuangan berbasis IFRS maka diwajibkan untuk melakukan pengungkapan penuh (*Full Disclosure*). Pengungkapan dilakukan dengan membuat laporan keuangan atau laporan tahunan (*Annual Report*). Pengungkapan dalam *annual report* merupakan salah satu isu penting di dunia pasar modal. *Annual report* merupakan salah satu sumber utama informasi keuangan bagi sejumlah pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi terutama oleh pemegang saham dan investor untuk menentukan tujuan investasi mereka (Belkaoui, 2000).

Semakin meningkatnya tingkat kepatuhan pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan, maka perusahaan akan memperoleh manfaat yang positif. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Choi dan Mueller (1997) bahwa:

Meningkatnya pengungkapan dalam perusahaan akan meningkatkan distribusi probabilitas subyektif dari hasil yang diharapkan suatu sekuritas di mata para investor dengan mengurangi ketidakpastian (resiko) yang berhubungan dengan aliran pengembalian tersebut. Selain itu, bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja di atas rata-rata industri, pengungkapan yang lebih baik cenderung meningkatkan kepentingan relatif yang ditempatkan para investor pada data-data perusahaan tersebut.

Menurut Suhardjanto dan Miranti (2009), terdapat dua sifat pengungkapan, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). *Mandatory disclosure* mengacu pada informasi yang harus diungkapkan sebagai konsekuensi dari adanya ketentuan perundang-undangan, pasar saham, komisi bursa saham, atau peraturan akuntansi dari pihak yang berwenang, sedangkan *voluntary disclosure* merupakan informasi yang secara sukarela diungkapkan oleh perusahaan (Adina dan Ion, 2008).

Mandatory disclosure bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan, memastikan pengendalian kualitas kinerja melalui ketaatan terhadap hukum dan standar akuntansi yang berlaku (Adina dan Ion, 2008), memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kesehatan keuangan perusahaan dan menghitung beban masa depan sehingga investor dapat menentukan kesempatan pertumbuhan jangka panjang dan memperkirakan aliran kas keluar untuk suatu bisnis (Al Akra et al., 2010).

Penerapan standar akuntansi berbasis IFRS belum dapat menjamin perusahaan akan melakukan pengungkapan yang lebih tinggi. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem institusional yaitu *corporate governance* untuk mengawasi kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan harus dilakukan oleh suatu perusahaan karena struktur *corporate governance* di setiap negara berbeda-beda. Menurut Hertanti (dikutip oleh Nafisah, 2011), arah perubahan sosial masyarakat Indonesia yang menuntut diterapkannya prinsip *corporate governance* bagi para

pebisnis membuat isu pengungkapan semakin relevan untuk dikaji karena nilai keutamaan yang ada dalam *corporate governance* adalah *transparency, responsibility, fairness* dan *accountability*.

Corporate governance menjadi suatu hal yang penting untuk dilaksanakan mengingat seringkali terjadi konflik kepentingan antara pemegang saham atau komisaris dan para direktur dalam pengambilan keputusan (Hamzah dan Suparjan, 2009). Menurut Nofianti (2009), *good corporate governance* (GCG) diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan serta konsisten dengan peraturan perundang-undangan.

Penelitian tentang tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS masih jarang dilakukan di Indonesia, namun di luar negeri sudah banyak yang melakukan penelitian tersebut. Al Akra et al. (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh regulasi pengungkapan akuntansi, reformasi tata kelola dan perubahan kepemilikan akibat privatisasi pada kepatuhan pengungkapan wajib. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi regulasi pengungkapan menghasilkan pengaruh yang paling signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan wajib. Selain itu penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi pemerintahan melalui mandat komite audit muncul sebagai penentu yang signifikan dari kepatuhan terhadap persyaratan pengungkapan wajib. Pada penelitian yang dilakukan oleh Al Akra et al. (2010) variabel struktur *corporate governance* yang digunakan hanya terbatas pada ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen dan komite audit.

Di Indonesia penelitian dilakukan oleh Prawinandi et al. (2012) yang meneliti tentang tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi *International*

Financial Reporting Standard (IFRS) di perusahaan jasa, serta pengaruh dari struktur *corporate governance* (CG) dengan tingkat kepatuhan pengungkapan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur *corporate governance* mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS. Variabel struktur tata kelola perusahaan yang mempengaruhi kepatuhan adalah proporsi komisaris independen dan jumlah komite audit.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan struktur *corporate governance* yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif. Struktur *corporate governance* merupakan suatu susunan organ di dalam perusahaan yang menjalankan fungsi tata kelola sebagai pihak pengawas dan pihak yang menjalankan perusahaan (Prawinandi et al., 2012). Inti *corporate governance* di Indonesia adalah pada dewan komisaris (FCGI, 2001). Oleh karena itu, struktur *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah dewan komisaris serta komite audit yang merupakan suatu komite di bawah dewan komisaris.

Penelitian Al Akra et al. (2010) telah meneliti tentang pengaruh regulasi pengungkapan akuntansi, reformasi tata kelola dan perubahan kepemilikan, akibat privatisasi, pada kepatuhan pengungkapan wajib dari sampel 80 perusahaan nonkeuangan. Namun, terdapat kelemahan dari penelitian yang dilakukan oleh Al Akra et al. (2010), yaitu terkait hasil penelitian yang tidak dapat digeneralisasikan untuk pasar lain di luar negara Yordania. Hal ini dikarenakan pada penelitian yang

dilakukan oleh Al Akra et al. (2010) masih didasarkan pada pasar geografis tunggal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Al Akra et al. (2010) adalah perbedaan lokasi dan sampel. Penelitian Al Akra et al. (2010) menggunakan lokasi pada negara Yordania dengan menggunakan perusahaan nonkeuangan sebagai sampel penelitian. Sementara penelitian ini dilakukan pada seluruh perusahaan jasa yang telah *go public* di Indonesia. Objek penelitian ini adalah laporan tahunan dan laporan keuangan terutama berfokus pada laporan laba rugi komprehensif perusahaan. Penelitian ini berfokus pada laporan laba rugi komprehensif karena laporan laba rugi komprehensif merupakan laporan yang selalu diperhatikan oleh *stakeholders* dalam *annual report* sebagai pedoman mereka dalam mengambil keputusan. Selain itu, laporan laba rugi komprehensif juga menggambarkan kinerja perusahaan dalam satu periode pelaporan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana struktur *corporate governance* perusahaan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengungkapan konvergensi IFRS yang berfokus pada laporan laba rugi komprehensif dan struktur *corporate governance*. Struktur *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah anggota komite audit, jumlah rapat dewan komisaris, dan jumlah rapat komite audit.

1.2 Rumusan Masalah

Semua perusahaan *go public* dan multinasional di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan standar akuntansi yang konvergen dengan IFRS untuk penyusunan laporan keuangan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012 (Gamayuni, 2009). Permasalahan akan muncul apabila suatu perusahaan belum mampu menerapkan standar akuntansi keuangan yang konvergen dengan IFRS.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka akan muncul pertanyaan penelitian, yaitu apakah *corporate governance* yang dalam penelitian ini direpresentasikan oleh jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah anggota komite audit, jumlah rapat dewan komisaris, dan jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh jumlah anggota dewan komisaris terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif.
2. Untuk menganalisis pengaruh proporsi komisaris independen terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif.
3. Untuk menganalisis pengaruh jumlah anggota komite audit terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif.

4. Untuk menganalisis pengaruh jumlah rapat dewan komisaris terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif.
5. Untuk menganalisis pengaruh jumlah rapat komite audit terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan jasa yang telah *go public*, penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi manajemen mengenai mekanisme *corporate governance* kaitannya dengan tingkat kepatuhan pengungkapan.
2. Bagi investor, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang tingkat kepatuhan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan kaitannya dalam pengambilan keputusan ekonomi.
3. Bagi pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak terkait, penelitian dapat digunakan sebagai pendorong untuk menetapkan kebijakan ataupun standar pengungkapan wajib yang lebih baik.
4. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai struktur *corporate governance* yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan ini berisi penjelasan informasi secara singkat mengenai materi yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab pendahuluan memberikan penjelasan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Telaah Pustaka

Bab telaah pustaka memberikan penjelasan tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian ini, uraian tentang penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis untuk memberi penjelasan secara logis maksud dari penelitian, dilanjutkan dengan penjelasan hipotesis.

Bab III Metode Penelitian

Bab metode penelitian memberikan penjelasan tentang desain penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab hasil dan pembahasan memberikan penjelasan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data yang menjelaskan hasil olahan data sesuai alat dan teknik analisis yang digunakan dan interpretasi hasil penelitian.

Bab V Penutup

Bab penutup memberikan penjelasan tentang simpulan dari hasil pengolahan data, keterbatasan penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dalam bagian ini akan diuraikan teori-teori yang melandasi dilakukannya penelitian ini. Mulai dari pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) konvergensi IFRS, struktur *corporate governance* dan teori agensi.

2.1.1 Pengungkapan Wajib (*Mandatory Disclosure*) Konvergensi IFRS

Menurut pendapat Suhardjanto dan Miranti (2009), terdapat dua sifat pengungkapan, yaitu pengungkapan yang didasarkan pada ketentuan (*required/regulated/mandatory disclosure*) dan pengungkapan yang bersifat sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib adalah pengungkapan yang diharuskan oleh peraturan atau ketentuan seperti yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, Departemen Keuangan Republik Indonesia atau oleh organisasi profesi akuntansi (Ikatan Akuntan Indonesia) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan tambahan yang melebihi dari pengungkapan yang diwajibkan (Farichah, 2009).

Mandatory disclosure bertujuan memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan, memastikan pengendalian kualitas kinerja melalui ketaatan terhadap hukum dan standar akuntansi yang berlaku (Adina dan Ion, 2008), memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kesehatan keuangan perusahaan

dan menghitung beban masa depan sehingga investor dapat menentukan kesempatan pertumbuhan jangka panjang dan memperkirakan aliran kas keluar untuk suatu bisnis (Al Akra et al., 2010). Informasi yang diungkapkan berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk memahami isi dan angka-angka dalam laporan keuangan.

Konvergensi dalam standar akuntansi keuangan merupakan suatu proses untuk menyesuaikan standar akuntansi yang digunakan di negara lain dengan kondisi yang ada di dalam negeri. Dalam hal ini, konvergensi IFRS adalah suatu proses untuk menyesuaikan standar akuntansi keuangan (SAK) terhadap IFRS. Konvergensi IFRS merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai anggota dari *The Group of Twenty* (G20 Forum) di Washington DC pada tanggal 15 November 2008. Selain itu, Indonesia merupakan bagian dari IFAC yang harus tunduk pada SMO (*Statement of Membership Obligation*) yaitu dengan menerapkan IFRS.

Gamayuni (2009) mengungkapkan bahwa, IFRS (*International Financial Reporting Standard*) merupakan suatu upaya untuk memperkuat arsitektur keuangan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap kurangnya transparansi informasi keuangan. Tujuan IFRS adalah memastikan bahwa laporan keuangan interim perusahaan untuk periode-periode yang dimasukkan dalam laporan keuangan tahunan, mengandung informasi berkualitas tinggi yang: (1) Menghasilkan transparansi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang periode yang disajikan., (2) menyediakan titik awal yang memadai untuk

akuntansi yang berdasarkan pada IFRS., (3) dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna (Gamayuni, 2009).

Di negara Yordania telah mengembangkan kerangka tata kelola perusahaan yang bekerja sama dengan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD). Salah satu bagian dari kerangka tata kelola perusahaan di Yordania adalah prinsip persyaratan pengungkapan umum. Persyaratan pengungkapan umum mengharuskan perusahaan untuk melakukan pengungkapan dengan tepat waktu yang berisi semua hal material mengenai korporasi, standar yang tinggi untuk pelaporan keuangan, pelaksanaan audit laporan keuangan oleh auditor independen di setiap tahunnya, saluran komunikasi yang efektif untuk kewajaran dan penyebaran informasi perusahaan lain dengan tepat waktu, serta ketetapan analisis dan saran oleh para ahli eksternal. Pada umumnya Yordania mengikuti prinsip yang mewajibkan penggunaan IFRS, mewajibkan semua laporan keuangan tahunan diaudit oleh auditor eksternal, dan mandat dari komite audit (Al Akra et al., 2010).

2.1.2 Struktur *Corporate Governance*

FCGI (2001) mengungkapkan bahwa, *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Dalam tata kelola perusahaan di Yordania terdapat

empat prinsip penting dengan analisis perbandingan terhadap kode OECD. Empat prinsip tersebut antara lain; hak-hak pemegang saham, perlakuan yang adil terhadap pemegang saham, peran *stakeholder* dalam tata kelola perusahaan, persyaratan pengungkapan umum, dan tanggung jawab dewan.

Corporate governance menjadi suatu hal yang penting untuk dilaksanakan mengingat seringnya terjadi konflik kepentingan antara pemegang saham atau komisaris dan para direktur dalam pengambilan keputusan. *Corporate governance* dapat membawa manfaat bagi perusahaan antara lain; meminimalkan *agency cost*, meminimalkan *cost of capital*, meningkatkan nilai saham perusahaan, serta mengangkat citra perusahaan (Hamzah dan Suparjan, 2009).

Hamzah dan Suparjan (2009) mengungkapkan bahwa, walaupun banyak manfaat yang diperoleh melalui *corporate governance*, tetapi minat dunia usaha terhadap pengembangan wacana dan praktek *good corporate governance* masih rendah. Hal tersebut dapat terlihat dari rendahnya partisipasi perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia untuk ikut dalam *survey Corporate Governance Perception Index* tahun 2002, yaitu hanya 10% dari populasi. Pelaksanaan *good corporate governance* sangat diperlukan untuk memenuhi kepercayaan masyarakat dan dunia Internasional sebagai syarat mutlak dalam menjalankan bisnis mereka.

Indonesia menganut sistem dua tingkat atau *Two Tiers System*, artinya perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi) (FCGI, 2001). Struktur

corporate governance merupakan dua badan terpisah yang melaksanakan fungsi tata kelola perusahaan dalam hal pengawasan dan pihak yang menjalankan perusahaan.

Prinsip *corporate governance* yang baik harus didasarkan pada lima hal, yaitu *transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness*. Asas *good corporate governance* tersebut menurut Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER – 01/MBU/2011, yaitu:

1. Transparansi (*Transparency*)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

Prinsip *transparency* merupakan prinsip penting dalam *corporate governance* kaitannya dalam pengambilan keputusan ekonomi karena saat pengambilan keputusan ekonomi semua pihak harus mengetahui latar belakang, alasan dan kegunaan dari keputusan yang akan diambil.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Prinsip akuntabilitas menuntut jawaban dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang telah dibebankan pada suatu fungsi karena

dalam kata *accountability* mengandung makna *answerability, liability, dan responsibility*.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Dalam hal ini sangat penting bagi kegiatan operasional perusahaan untuk mengikuti atau memenuhi ketentuan perundang-undangan yang telah diatur oleh negara.

4. Kemandirian (*Independency*)

Keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Prinsip kemandirian dan prinsip pertanggungjawaban saling berkaitan. Dengan dijalankannya prinsip kemandirian maka perusahaan akan dapat menerapkan prinsip pertanggungjawaban untuk menghindari kemungkinan terjadinya benturan kepentingan di antara berbagai pihak.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholder*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini perusahaan harus memberikan jaminan dan perlakuan yang sama terhadap *stakeholder* untuk menghindari terjadinya konflik dengan menginformasikan semua hak dan kewajiban serta kewenangan dari masing-masing *stakeholder*.

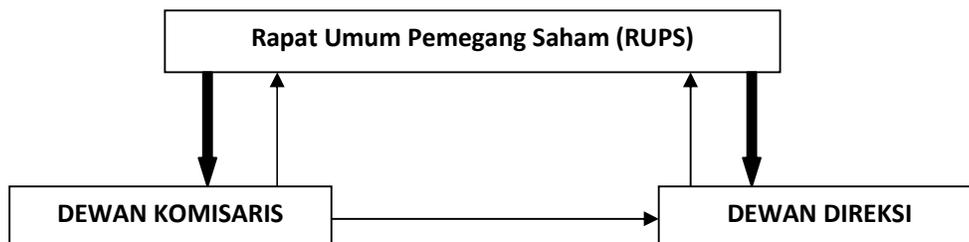
Konvergensi IFRS di Indonesia belum cukup untuk memberikan jaminan atas tingkat kepatuhan pengungkapan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem untuk mengawasi kinerja perusahaan dan menjamin bahwa perusahaan mengungkapkan informasi yang bersifat material.

2.1.2.1 Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Menurut FCGI (2001), dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

Dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2006, disebutkan bahwa kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan (*two-board system*) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang

mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (*fiduciary responsibility*).



Gambar 2.1
Struktur *Two Tiers System* yang diterapkan di Indonesia
(sumber : Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga disebutkan bahwa jumlah minimal anggota dewan komisaris adalah satu orang. Dijelaskan pula dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Organ Perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Pengangkatan maupun pemberhentian dewan direksi dan dewan komisaris dilakukan melalui rapat umum pemegang saham. Selanjutnya, dewan direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab terhadap RUPS. Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi dan memberi nasihat kepada dewan direksi.

2.1.2.2 Proporsi Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi. FCGI (2001) menyatakan bahwa, kriteria komisaris independen di Indonesia diambil dari kriteria otoritas bursa efek Australia tentang *outside*

directors, di mana kriteria tersebut menekankan tentang pentingnya independensi dalam dewan komisaris.

Dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2006, dijelaskan bahwa jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu dari Komisaris Independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan. Semakin besar jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan maka pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen akan semakin berkualitas dan akan meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan.

2.1.2.3 Jumlah Anggota Komite Audit

FCGI (2001) mengungkapkan bahwa, agar dapat menjalankan fungsinya di tengah lingkungan bisnis yang kompleks dengan baik, dewan komisaris perlu membentuk komite-komite yang membantunya menjalankan tugas, salah satunya adalah komite audit. Komite audit dipandang sebagai suatu komite dalam perusahaan yang bertugas untuk mengawasi kinerja manajemen untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan yang mungkin akan merugikan *stakeholders*. Berdasarkan Peraturan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/2004 disebutkan bahwa komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang lainnya berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.

Menurut Hukum Efek 2002 (dikutip oleh Al Akra et al., 2010), anggota komite audit bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan perusahaan dengan persyaratan pengungkapan wajib. Komite audit bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris (Trisnawati, 2009).

Komite audit selain bertugas dalam melakukan pengawasan kinerja manajemen juga berperan penting sebagai penghubung antara pemegang saham dengan dewan komisaris untuk menghindari masalah pengendalian internal perusahaan. Dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh KNKG tahun 2006, disebutkan bahwa komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan:

- a. Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- b. Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik.
- c. Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.
- d. Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

2.1.2.4 Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh KNKG tahun 2006, mengungkapkan bahwa Dewan Komisaris

sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG. Namun, Dewan Komisaris tidak diperbolehkan untuk turut berperan dalam pengambilan keputusan operasional.

Dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-01/MBU/2011 disebutkan bahwa, rapat Dewan Komisaris harus diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. Besarnya intensitas pertemuan yang diadakan oleh Dewan Komisaris diharapkan akan mampu meningkatkan kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

2.1.2.5 Jumlah Rapat Komite Audit

Rapat komite audit merupakan koordinasi antara anggota-anggotanya agar dapat menjalankan tugas secara efektif dalam hal pengawasan laporan keuangan, pengendalian internal, dan pelaksanaan GCG perusahaan (Ratnasari, 2011). Rapat Komite Audit yang sering diadakan diharapkan akan dapat meningkatkan pengungkapan wajib IFRS.

Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-29/PM/2004 dalam peraturan nomor IX.1.5 mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit dijelaskan bahwa, Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.

2.1.3 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Herawaty (2008), *corporate governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberi keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang mereka investasikan. Tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai sistem *checks and balances*, baik internal maupun eksternal perusahaan, yang memastikan bahwa perusahaan melaksanakan akuntabilitas mereka kepada semua pemangku kepentingan mereka dan bertindak dalam cara yang bertanggungjawab secara sosial dalam semua bidang kegiatan bisnis mereka (Solomon, 2007).

Pemisahan kepemilikan antara *principal* dengan agen cenderung akan menimbulkan konflik keagenan. Sama halnya dengan investor dan manajemen perusahaan. Manajemen harus dapat meyakinkan investor bahwa pihaknya tidak akan menyalahgunakan dana yang telah diinvestasikan oleh investor. Oleh karena itu, manajemen perusahaan melakukan pengungkapan informasi kinerja manajemen dalam laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada investor.

Mutmainah (2006) berpendapat bahwa, teori agensi memudahkanantisipasi atas konsekuensi logis dengan menyediakan suatu kerangka untuk pemahaman dan selanjutnya meramalkan perilaku. Selain itu Mutmainah (2006) menjelaskan bahwa, kekuatan utama teori agen adalah kemampuannya menyediakan desain pengendalian yang secara simultan membantu meningkatkan kesejahteraan kedua belah pihak.

Penerapan konsep *corporate governance* diharapkan memberikan kepercayaan terhadap agen (manajemen) dalam mengelola kekayaan pemilik (pemegang saham), dan pemilik menjadi lebih yakin bahwa agen tidak akan melakukan suatu kecurangan untuk kesejahteraan agen sehingga dapat meminimumkan konflik kepentingan dan meminimumkan biaya keagenan (Ratnasari, 2011). Penggunaan teori agensi relevan untuk penelitian ini karena teori agensi menganggap bahwa seseorang memiliki banyak peran dalam organisasi. Selanjutnya teori agensi berasumsi bahwa pandangan kontraktual dari perilaku manusia dapat memberikan ramalan atau gambaran tentang konsekuensi logis secara tepat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan pengaruh struktur *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS.

Al Akra et al., (2010), melakukan penelitian yang menguji pengaruh regulasi pengungkapan akuntansi, reformasi tata kelola dan perubahan kepemilikan terhadap kepatuhan pengungkapan wajib. Menggunakan sampel 80 perusahaan nonkeuangan di Yordania penelitian ini menggunakan *checklist* berdasarkan *International Financial Reporting Standar (IFRS)* yang berlaku pada tahun 1996 dan 2004. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pengungkapan dengan IFRS secara signifikan lebih tinggi pada tahun

2004 dibandingkan tahun 1996. Reformasi regulasi pengungkapan menghasilkan pengaruh yang paling signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan wajib. Selain itu, reformasi pemerintahan melalui mandat komite audit muncul sebagai penentu signifikan dari kepatuhan terhadap persyaratan pengungkapan wajib.

Ettredge et al. (2010), melakukan penelitian dengan menguji pengaruh ukuran perusahaan, kualitas tata kelola perusahaan, berita buruk, kelas auditor eksternal terhadap kepatuhan pengungkapan. Metode analisis yang digunakan adalah uji regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perusahaan-perusahaan yang tidak patuh memiliki kualitas tata kelola perusahaan yang lebih rendah dan kurang membutuhkan pendanaan eksternal, tetapi tidak lebih kecil dari kepatuhan perusahaan kontrol. Kepatuhan berhubungan negatif terkait dengan berita buruk.

Penelitian dilakukan oleh Utami et al. (2012), yang melakukan penelitian tentang tingkat kepatuhan pengungkapan wajib dalam konvergensi IFRS kaitannya dengan mekanisme *corporate governance*. Pengukuran tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dikotomis, yaitu menggunakan item yang terkandung dalam presentasi IFRS dan daftar pengungkapan yang berasal dari kantor akuntan publik Deloitte. Hasil uji regresi berganda membuktikan bahwa mekanisme *corporate governance* mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Variabel independen yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional.

Prawinandi et al. (2012) juga melakukan penelitian tentang pengaruh struktur *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Uji regresi berganda membuktikan bahwa struktur *corporate governance* mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Variabel struktur *corporate governance* yang mempengaruhi tingkat kepatuhan yaitu proporsi komisaris independen dan jumlah anggota komite audit.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam hasil penelitian. Selain itu perbedaan juga terdapat pada objek perusahaan dan variabel yang digunakan dalam penelitian mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS. Terdapat kelemahan dari penelitian yang dilakukan oleh Al Akra et al. (2010), yaitu hasil penelitian yang tidak dapat digeneralisasikan untuk pasar di luar negara Yordania. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Utami et al. (2012) dan Prawinandi et al. (2012) kelemahan terdapat pada hasil penelitian yang tidak dapat digeneralisasi untuk semua perusahaan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Al Akra et al. (2010) dan Prawinandi et al. (2012). Perbedaan terdapat pada variabel penelitian, selain menggunakan variabel jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan jumlah anggota komite audit sebagai variabel independen yang juga digunakan oleh Prawinandi et al. (2012) penelitian ini menggunakan variabel jumlah rapat dewan komisaris dan jumlah

rapat komite audit. Penelitian ini juga memperbarui tahun penelitian yaitu dengan mengambil data pada tahun 2010, 2011, dan 2012.

Tabel 2.1 menjelaskan PSAK yang secara umum diterapkan untuk laporan laba rugi komprehensif dan diungkapkan oleh perusahaan. Penelitian ini menggunakan IAS 2, 8, 12, 16, 18, 21, 24, 33 dan 37 untuk mengetahui tingkat kepatuhan perusahaan terhadap PSAK yang telah konvergen dengan IFRS. IAS 19 *Employee Benefits* tidak digunakan dalam penelitian ini karena *checklist mandatory disclosure* berlaku efektif mulai tahun 2013.

Tabel 2.1
PSAK yang telah konvergen dengan IFRS Terkait pada Laporan laba rugi komprehensif

No.	Nomor PSAK	Nomor IAS	Tanggal Efektif
1.	PSAK 14 (Rev. 2008) Persediaan	IAS 2 <i>Inventories</i>	01-01-09
2.	PSAK 25 (Rev. 2009) Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan	IAS 8 <i>Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors.</i>	01-01-11
3.	PSAK 46 (Rev. 2010) Pajak Pendapatan	IAS 12 <i>Income Taxes</i>	01-01-12
4.	PSAK 16 (Rev. 2007) Aset Tetap	IAS 16 <i>Property, Plant and Equipment</i>	01-01-08
5.	PSAK 23 (Rev. 2010) Pendapatan	IAS18 <i>Revenue</i>	01-01-11
6.	ED PSAK 24 (Rev. 2010) Imbalan Kerja	IAS 19 <i>Employee Benefits</i>	01-01-13
7.	PSAK 10 (Rev. 2010) Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing	IAS 21 <i>The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates</i>	01-01-12
8.	PSAK 7 (Rev. 2010) Pengungkapan Pihak-Pihak yang Berelasi	IAS 24 <i>Related Party Disclosure</i>	01-01-11
9.	PSAK 56 (Rev. 2010) Laba per Saham	IAS 33 <i>Earnings Per Share</i>	01-01-12

10.	PSAK 57 (Rev. 2009) Provisi, Liabilitas Kontijensi, dan Aset Kontijensi	IAS 37 <i>Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets</i>	01-01-11
-----	---	--	----------

Sumber: www.iaiglobal.or.id dan *Deloitte IFRS Presentation and Disclosure Checklist*

Variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini masih terdapat *Research Gap* terkait hasil penelitian terdahulu. Tabel berikut merupakan penjabaran *Research Gap* terkait hasil penelitian terdahulu.

Tabel 2.2
Research Gap

Variabel Penelitian	Nama Peneliti	Hasil Penelitian
Jumlah anggota dewan komisaris	- Al Akra et al. (2010)	- Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS.
	- Prawinandi et al. (2012)	- Jumlah anggota dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan <i>mandatory disclosure</i> konvergensi IFRS.
Proporsi Komisaris Independen	- Prawinandi et al. (2012)	- Proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan <i>mandatory disclosure</i> konvergensi IFRS.
	- Utami et al. (2012)	- Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.
Jumlah anggota komite audit	- Al Akra et al. (2010)	- Jumlah komite audit merupakan faktor yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.
	- Prawinandi et al. (2012)	- Jumlah anggota komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kepatuhan <i>mandatory disclosure</i> konvergensi IFRS.

Jumlah rapat dewan komisaris	- Ettredge et al. (2010) - Utami et al. (2012)	- Dewan komisaris yang lebih sering mengadakan pertemuan akan meningkatkan kepatuhan pengungkapan. - Jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.
Jumlah rapat komite audit	- Ettredge et al. (2010) - Utami et al. (2012)	- Frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib IFRS. - Jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

2.2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan ditampilkan ringkasan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya ditunjukkan dengan menggunakan tabel yang terdiri atas Nama Peneliti, Variabel Penelitian, Alat Analisis dan Hasil Penelitian.

Tabel 2.3
Ringkasan Penelitian Terdahulu

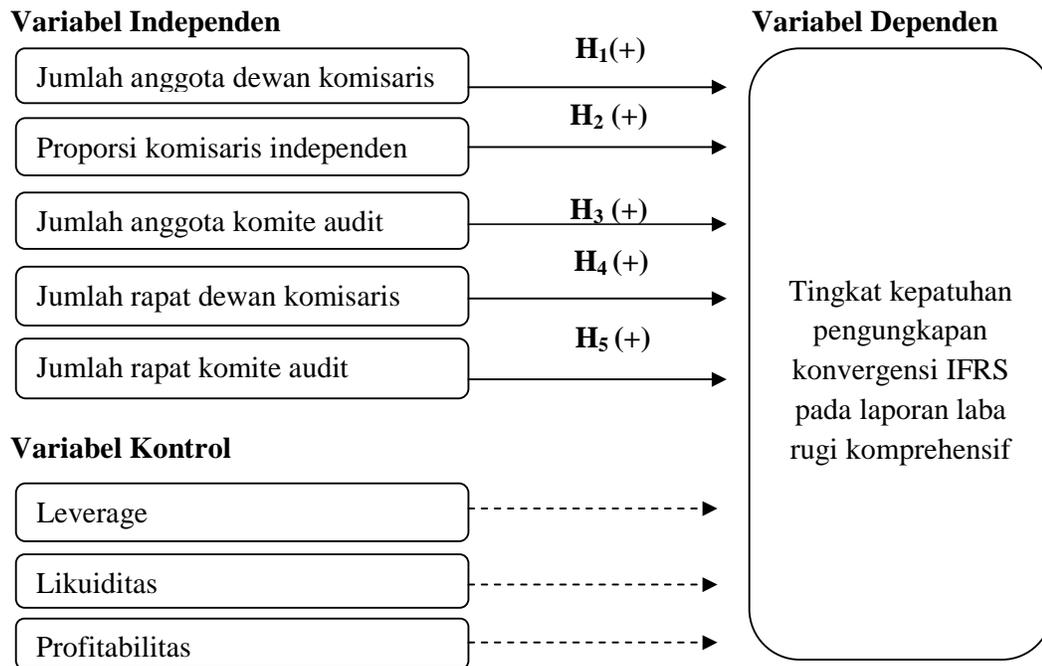
No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Al Akra et al., (2010)	<u>Variabel Independen</u> Variabel <i>corporate governance</i> yang direpresentasikan dengan direktur non-eksekutif, mandat komite audit, dan ukuran dewan komisaris; struktur kepemilikan. <u>Variabel Dependen</u> Regulasi	Uji regresi berganda	- Reformasi regulasi pengungkapan menghasilkan pengaruh yang paling signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan wajib. - Reformasi pemerintahan melalui mandat komite audit muncul sebagai penentu signifikan dari kepatuhan terhadap

		<p>pengungkapan.</p> <p><u>Variabel Kontrol</u> Ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, identitas perusahaan audit, likuiditas, jenis industri, daftar dan usia perusahaan.</p>		<p>persyaratan pengungkapan wajib.</p>
2.	Ettredge et al., (2010)	<p><u>Variabel Independen</u> Ukuran perusahaan, kualitas tata kelola perusahaan, berita buruk, kelas auditor eksternal</p> <p><u>Variabel Dependen</u> Kepatuhan Pengungkapan</p> <p><u>Variabel Kontrol</u> Modal eksternal, kesehatan keuangan perusahaan</p>	<p>Uji Regresi Logistik</p>	<p>- Perusahaan-perusahaan yang tidak patuh memiliki kualitas tata kelola perusahaan yang lebih rendah dan kurang membutuhkan pendanaan eksternal, tetapi tidak lebih kecil dari kepatuhan perusahaan kontrol.</p> <p>- Kepatuhan berhubungan negatif terkait dengan berita buruk.</p>
3.	Utami et al., (2012)	<p><u>Variabel Independen</u> Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat komite audit, proporsi komisaris independen.</p> <p><u>Variabel Dependen</u> Tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.</p> <p><u>Variabel Kontrol</u> <i>Leverage,</i></p>	<p>Uji regresi berganda</p>	<p>- Kepemilikan manajerial mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib</p> <p>- Kepemilikan institusional mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib.</p>

		profitabilitaas, tipe auditor.		
4.	Prawinandi et al., (2012)	<u>Variabel Independen</u> Struktur <i>corporate governance</i> : jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, latar belakang pendidikan komisaris utama, proporsi komisaris wanita, jumlah anggota komite audit. <u>Variabel Dependen</u> Tingkat kepatuhan <i>mandatory disclosure</i> konvergensi IFRS. <u>Variabel Kontrol</u> Jumlah anggota dewan direksi profitabilitas, dan <i>leverage</i> .	Uji regresi berganda	- Proporsi komisaris independen mempengaruhi tingkat kepatuhan <i>mandatory disclosure</i> konvergensi IFRS. - Jumlah anggota komite audit mempengaruhi tingkat kepatuhan <i>mandatory disclosure</i> konvergensi IFRS.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh struktur *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif. Melalui gambaran kerangka pemikiran berikut, diharapkan variabel independen yang terdiri atas jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah anggota komite audit, jumlah rapat dewan komisaris, dan jumlah rapat komite audit akan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS. Di bawah ini digambarkan hubungan masing-masing variabel:



Gambar 2.2
Skema Kerangka Pemikiran

2.4 Perumusan Hipotesis

Pada bagian ini akan diuraikan hipotesis-hipotesis penelitian yang dilengkapi oleh argumentasi yang mendasari penentuan hipotesis. Dalam penelitian ini terdapat lima hipotesis, yaitu:

1. Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jumlah minimal anggota dewan komisaris adalah 1 orang. Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan perusahaan serta memberi nasihat kepada dewan direksi.

Penelitian yang dilakukan oleh Prawinandi et al. (2012) menunjukkan bahwa, jumlah anggota dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Jumlah anggota dewan komisaris yang besar akan sulit mencapai kesepakatan dalam pengambilan keputusan, di sisi lain dengan jumlah anggota dewan komisaris yang kecil maka fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris tidak maksimal. Fungsi pengawasan dewan komisaris yang tidak maksimal mengakibatkan tingkat kepatuhan perusahaan untuk mengungkapkan informasi wajib menjadi rendah.

Teori agensi merupakan suatu konsep yang menjelaskan hubungan antara *principal* dan manajemen. Manajemen harus dapat meyakinkan investor bahwa manajemen tidak akan menyalahgunakan dana yang telah diinvestasikan. Dalam hal ini manajemen perusahaan dengan jumlah anggota dewan komisaris yang besar akan memudahkan untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan manajemen dan memantau kinerja *Chief Executif Officer* (CEO) sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan diharapkan akan mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS. Penelitian yang dilakukan oleh Al Akra et al. (2010) menunjukkan bahwa, jumlah anggota Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan.

Hipotesis yang dirumuskan dari uraian di atas yaitu:

H₁ : Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif.

2. Proporsi Komisaris Independen

Dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 disebutkan bahwa, dalam komposisi Dewan Komisaris, paling sedikit 20% (dua puluh persen) merupakan anggota Dewan Komisaris Independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya. Keberadaan Komisaris Independen dipandang lebih efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan suatu perusahaan dengan menuntut adanya transparansi dalam laporan keuangan perusahaan.

Menurut Sutedi (dikutip dari Utami, 2012), ketentuan minimum dewan komisaris independen sebesar 30% belum cukup untuk membuat komisaris independen tersebut mendominasi kebijakan yang diambil oleh dewan komisaris. Penelitian yang dilakukan oleh Utami et al. (2012) menunjukkan bahwa, proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS.

Agency theory menjelaskan perlunya praktik pengungkapan laporan keuangan oleh manajemen kepada para pemegang saham, investor maupun pihak lain yang berkepentingan (Diyanti, 2010). Praktik pengungkapan perlu dilakukan untuk menghindari asimetri informasi antara manajemen dengan *stakeholders*. Dalam hal ini proporsi komisaris independen memegang peran penting dalam perusahaan untuk melakukan

pengawasan terhadap kinerja manajemen, sehingga dapat meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Prawinandi et al. (2012) pada perusahaan jasa di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS.

Hipotesis yang dirumuskan dari uraian di atas yaitu:

H₂ : Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif.

3. Jumlah Anggota Komite Audit

Perusahaan *go public* di Indonesia diwajibkan memiliki komite audit yang bertugas untuk memberi pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang perlu disampaikan oleh dewan direksi kepada dewan komisaris. Membangun peran komite audit yang efektif tidak dapat terlepas dari kacamata penerapan prinsip GCG secara keseluruhan di suatu perusahaan dimana independensi, transparansi dan *disclosure*, akuntabilitas dan tanggung jawab, serta sikap adil menjadi prinsip dan landasan organisasi perusahaan (Alijoyo, 2003).

Jumlah anggota komite audit yang terlalu besar mengakibatkan tugas pengawasan menjadi tidak efektif karena koordinasi dan komunikasi antar anggota sulit terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh Prawinandi et al. (2012) menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh

signifikan negatif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Dalam praktik *corporate governance*, teori agensi mensyaratkan untuk melakukan pengungkapan laporan keuangan untuk menghindari konflik diantara pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini anggota komite audit berperan untuk mengawasi manajemen agar mengungkapkan laporan keuangan secara lengkap dan jelas. Oleh karena itu, semakin besar jumlah anggota komite audit maka akan semakin mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Al Akra et al. (2010) menunjukkan bahwa jumlah komite audit adalah faktor yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan pengungkapan wajib.

Hipotesis yang dirumuskan dari uraian di atas yaitu:

H₃ : Jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif.

4. Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Dalam Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER – 01/MBU/2011, disebutkan bahwa Dewan Komisaris bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai BUMN maupun usaha BUMN dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam hal ini, kinerja yang dilakukan oleh Dewan Komisaris akan

dapat dilihat efektivitasnya melalui kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat yang secara rutin diadakan.

Efektivitas rapat dewan komisaris penting untuk memonitor perusahaan. Namun apabila dalam rapat terdapat komisaris yang mendominasi dan hanya mementingkan kepentingan pribadi maka jumlah rapat yang dilakukan dewan komisaris tidak dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan. Hal ini sejalan dengan penelitian Utami et al. (2012), jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS.

Berdasarkan teori agensi, agen harus mampu memberikan keyakinan kepada investor, bahwa agen tidak akan menyalahgunakan dana yang telah diinvestasikan oleh investor. Oleh karena itu, agar manajemen dapat memberi keyakinan kepada investor maka diperlukan pertemuan rutin dewan komisaris. Hal ini dilakukan agar dewan komisaris dapat terus memantau kinerja manajemen untuk melakukan pengungkapan secara luas dalam laporan keuangan untuk memberikan transparansi informasi terhadap investor. Semakin banyak jumlah rapat dewan komisaris akan memudahkan untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam melaksanakan strategi dan kebijakan perusahaan. Pernyataan itu sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ettredge et al. (2010) yang menunjukkan bahwa, pertemuan yang sering diadakan oleh Dewan Komisaris akan meningkatkan kepatuhan pengungkapan.

Hipotesis yang dirumuskan dari uraian di atas yaitu:

H₄ : Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif.

5. Jumlah Rapat Komite Audit

Menurut Alijoyo (2003), Komite Audit harus mengadakan rapat sedikitnya satu kali setiap kuartal. Hal ini menyiratkan bahwa komite audit wajib mengadakan pertemuan minimal satu kali dalam tiga bulan agar dapat memantau tugas dan fungsi dari Komite Audit tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Utami et al. (2012) menunjukkan bahwa jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS. Jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan dapat disebabkan karena perusahaan tidak menjalin koordinasi yang baik dengan auditor eksternal maupun dengan manajemen perusahaan. Koordinasi yang kurang dalam pelaksanaan rapat komite audit mengakibatkan fungsi pengawasan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan menjadi rendah.

Teori agensi mensyaratkan pengungkapan yang lengkap dan jelas dalam laporan keuangan. Dalam hal ini, agar dapat memberikan transparansi dalam laporan keuangan maka perlu didukung oleh adanya agenda program kerja tahunan dari komite audit serta keteraturan rapat yang diadakan oleh komite audit. Oleh karena itu, semakin tinggi intensitas pertemuan yang diadakan oleh komite audit diharapkan akan

meningkatkan kepatuhan pengungkapan wajib. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Ettredge et al. (2010) menyimpulkan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan.

Hipotesis yang dirumuskan dari uraian di atas, yaitu:

H₅ : Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Sekaran (2003) mengungkapkan bahwa, hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan dugaan logis antara dua atau lebih variabel yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Penelitian ini menggunakan desain pengujian hipotesis karena bertujuan untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh *corporate governance* yang diprosikan oleh jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah anggota komite audit, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat komite audit terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif.

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Pada penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Masing-masing pengukuran variabel adalah sebagai berikut:

3.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif. Identifikasi item pengungkapan dilakukan dengan menggunakan *Deloitte IFRS Presentation and Disclosure Checklist* yang diperoleh dari situs www.iasplus.com. Beberapa item dipilih dari *checklist* tersebut dan disesuaikan

dengan PSAK yang berlaku di Indonesia dan penerapannya wajib pada tahun 2010, 2011 dan 2012.

Pengukuran variabel pengungkapan wajib konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif menggunakan teknik *scoring*, yaitu jika item yang perlu diungkapkan dapat diterapkan (*applicable*) dalam perusahaan dan item tersebut diungkapkan oleh perusahaan diberi skor 1, jika item tersebut tidak diungkapkan diberi skor 0, dan jika item tersebut tidak dapat diterapkan dalam perusahaan akan diberi tanda N/A (*Not Applicable*).

$$\text{MANDSCR}_{BY} = \frac{\sum \text{SCR}_{BY}}{\sum \text{MAX}_{BY}} \times 100\%$$

Pengukuran skor pengungkapan wajib ini sesuai dengan penelitian dari Prawinandi (2012), di mana MANDSCR_{BY} merupakan skor pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif perusahaan B pada tahun Y, SCR_{BY} merupakan jumlah item yang diungkapkan perusahaan B pada tahun Y, MAX_{BY} merupakan nilai maksimum yang mungkin dicapai perusahaan B pada tahun Y.

3.2.2 Variabel Independen

3.2.2.1 Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Jumlah anggota dewan komisaris yang lebih besar akan lebih efektif jika dibandingkan dengan jumlah anggota dewan komisaris yang kecil. Banyaknya anggota dewan komisaris dapat menghasilkan kemampuan pengawasan yang

lebih baik. Menurut KNKG (2006), jumlah anggota dewan komisaris diukur dengan jumlah komisaris dari pihak yang terafiliasi (memiliki hubungan, salah satunya pihak internal perusahaan) dan tidak terafiliasi (tidak memiliki hubungan) dengan perusahaan.

3.2.2.2 Proporsi Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2006). Indikator proporsi komisaris independen yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardhani (2006) yaitu proporsi komisaris independen dibandingkan dengan total jumlah komisaris dalam suatu perusahaan di periode t.

3.2.2.3 Jumlah Anggota Komite Audit

Dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh KNKG (2006) disebutkan bahwa jumlah anggota Komite Audit harus disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Salah satu dari anggota Komite Audit memiliki pengalaman dan kemampuan di bidang akuntansi dan atau keuangan. Pada penelitian ini indikator untuk mengukur jumlah anggota komite audit sesuai

dengan penelitian Zaluki dan Hussin (dikutip oleh Prawinandi et al., 2012) yaitu jumlah anggota komite audit dalam perusahaan.

3.2.2.4 Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Menurut *Corporate Governance Guidelines* (dikutip oleh Utami et al., 2012), dewan komisaris harus memiliki jadwal pertemuan tetap dan dapat dilakukan pertemuan tambahan sesuai dengan kebutuhan. Dewan Komisaris mengadakan pertemuan setidaknya satu kali dalam setiap bulan. Penelitian ini menggunakan indikator untuk mengukur jumlah rapat dewan komisaris sesuai dengan penelitian Ettredge et al. (2010) yaitu jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam satu tahun.

3.2.2.5 Jumlah Rapat Komite Audit

Pertemuan komite audit adalah tempat bagi direksi untuk membahas proses pelaporan keuangan dan itu adalah tempat di mana proses pengawasan pelaporan keuangan terjadi (Nor et al., 2010). Dalam Peraturan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/2004 disebutkan bahwa Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam penelitian ini, indikator untuk mengukur jumlah rapat komite audit yang digunakan sesuai dengan penelitian Ettredge et al. (2010) yaitu jumlah rapat komite audit yang diselenggarakan dalam jangka waktu satu tahun.

3.2.3 Variabel Kontrol

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol *leverage*, likuiditas, dan profitabilitas. Variabel kontrol dalam penelitian ini digunakan agar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

3.2.3.1 *Leverage*

Leverage adalah pengukuran besarnya aktiva yang dibiayai dengan utang (Utami, 2012). Perusahaan dengan *leverage* yang lebih tinggi akan menyediakan informasi yang lebih komprehensif dan membutuhkan biaya yang lebih besar (Diyanti, 2010). Hal ini dapat diartikan bahwa dengan *leverage* yang tinggi maka perusahaan akan mengeluarkan biaya pengawasan yang juga tinggi. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan sesuai dengan penelitian Prawinandi et al. (2012) yaitu dengan menggunakan rasio total utang terhadap total ekuitas perusahaan.

3.2.3.2 Likuiditas

Menurut Diyanti (2010), likuiditas dapat dipandang dari dua sisi. Pertama, tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan kuatnya kondisi keuangan perusahaan. Sisi yang lain menjelaskan bahwa, likuiditas yang rendah maka perusahaan akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak sebagai upaya dalam menjelaskan kinerja manajemen yang tidak baik. Dalam penelitian ini,

indikator yang digunakan sesuai dengan penelitian Al Akra et al. (2010) yaitu dengan menggunakan rasio *current assets* terhadap *current liabilities*.

3.2.3.3 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan (Diyanti, 2010). Pada umumnya perusahaan memperoleh laba dari aktivitas penjualan maupun aktivitas investasi. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan sesuai dengan penelitian Al Akra et al. (2010) yaitu dengan menggunakan *return on equity* (ROE).

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010, 2011 dan 2012. Pemilihan tahun 2010 dikarenakan pada tahun tersebut Indonesia dalam tahap adopsi standar akuntansi keuangan yang berbasis IFRS, sedangkan pada tahun 2011 merupakan tahap persiapan akhir pengimplementasian PSAK berbasis IFRS dan tahun 2012 adalah tahun di mana dilakkukan evaluasi secara komprehensif terhadap penggunaan PSAK berbasis IFRS. Jumlah anggota populasi dalam penelitian ini, yaitu sebanyak 236 perusahaan.

Sampel yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini

adalah perusahaan jasa yang menyediakan *annual report* dan laporan keuangan ke BEI dan juga mengungkapkan struktur *corporate governance* dalam *annual report*nya. Jumlah sampel yang diperoleh berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, yaitu sebanyak 40 perusahaan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa *annual report* dan laporan keuangan. Sumber data ini dapat diperoleh dari situs www.idx.co.id.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan metode dokumentasi menggunakan data sekunder yang dapat diperoleh dari *annual report* dan laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010, 2011 dan 2012. Data sekunder dikumpulkan dan diperoleh dari situs www.idx.co.id. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.

3.6 Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis deskriptif dan pengujian hipotesis. Pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS *release 16*.

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, dan sebagainya (Ghozali, 2011).

3.6.2 Pengujian Hipotesis

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of fit*nya. Secara statistik, setidaknya *goodness of fit* dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah di mana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah di mana H_0 diterima (Ghozali, 2011). Persamaan regresi berganda untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{MANDSCR} = b_0 + b_1\text{DWNKOM} + b_2\text{KOMIND} + b_3\text{KMTAUD} + b_4\text{RPTDWN} + b_5\text{RPTAUD} + b_6\text{LEV} + b_7\text{LIK} + b_8\text{PROF} + e$$

Keterangan Notasi Persamaan Regresi Berganda :

MANDSCR = *Mandatory Disclosure IFRS*

DWNKOM = Jumlah anggota Dewan Komisaris

KOMIND = Proporsi Komisaris Independen

KMTAUD = Jumlah Anggota Komite Audit

RPTDWN = Jumlah Rapat Dewan Komisaris

RPTAUD = Jumlah Rapat Komite Audit

LEV	= <i>Leverage</i>
LIK	= Likuiditas
PROF	= Profitabilitas
b_0	= Konstanta
$b_1 - b_8$	= Koefisien Regresi
e	= <i>error</i>

3.6.2.1 Analisis Regresi

Menurut Gujarati (dikutip oleh Ghozali, 2011), analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2011).

1. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum

koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2011).

2. Uji Signifikan Simultan (Nilai F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2011).

3. Uji Signifikan Parameter Individual (Nilai t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Uji t dilakukan dengan cara *Quick look* dan membandingkan nilai t terhadap titik kritis menurut tabel. Penggunaan cara *quick look* kita akan menerima hipotesis alternatif, dengan menyatakan bahwa variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Begitu pula jika nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai t tabel, maka hipotesis alternatif diterima yang menyatakan bahwa variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

3.6.2.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). Dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas adalah sebagai berikut:

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, serta tabel *Kolmogorov-smirnov* menunjukkan tingkat signifikansi di atas 5% maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, serta tabel *Kolmogorov-smirnov* menunjukkan tingkat signifikansi di bawah 5% maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal (Ghozali, 2011). Toleransi *value* VIF (*variance inflation factor*) digunakan untuk melakukan uji multikolonieritas. Jika hasilnya menunjukkan bahwa *tolerance value* $> 0,1$ dan $VIF < 10$ maka tidak terjadi multikolonieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah apabila hasilnya tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini uji Durbin Watson digunakan untuk menguji ada tidaknya autokorelasi dalam model analisis regresi.